

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019) kata "pemberdayaan" berasal dari kata "daya" yang diawali dengan "ber" sehingga menjadi "berdaya" yang berarti memiliki atau menguasai kekuasaan. Daya adalah kata untuk kekuatan, sedangkan pemberdayaan adalah kepemilikan kekuasaan. Definisi pemberdayaan adalah kemampuan untuk memberikan wewenang atau kekuatan kepada sesuatu.

Pemberdayaan adalah studi tentang bagaimana orang, organisasi, atau komunitas berusaha mengendalikan hidup mereka sendiri dan membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Tujuan pemberdayaan adalah memberi mereka yang lemah atau kurang beruntung lebih banyak kekuatan. Orang-orang dibimbing untuk mengendalikan hidup mereka melalui proses pemberdayaan, yang membuat mereka cukup kuat untuk mengambil bagian, berbagi kendali atas, dan memberi dampak pada lembaga dan acara yang berdampak pada hidup mereka. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa individu memperoleh kemampuan, informasi, dan wewenang yang diperlukan untuk memengaruhi kehidupan mereka sendiri serta kehidupan orang-orang yang mereka sayangi. Kemampuan individu, khususnya kelompok yang lemah dan rentan, untuk mengakses sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan mengambil bagian dalam keputusan dan proses pembangunan yang memengaruhi mereka dikenal sebagai pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan dan memberdayakan masyarakat. Dengan kata lain, ini tentang bagaimana memungkinkan masyarakat untuk mendukung dirinya sendiri.

Sementara itu, menurut Edi Suharto (2005) dari sudut pandang konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari istilah *power*. Oleh karena itu, konsep *power* disinggung dalam inti gagasan pemberdayaan. Membuat orang

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari minat dan keinginan mereka, merupakan definisi umum dari *power*. *Power* dikaitkan dengan pengaruh dan kontrol, menurut ilmu sosial tradisional. Karena gagasan pemberdayaan tidak memiliki definisi yang tepat, interpretasi ilmuwan sosial terhadapnya bervariasi tergantung pada latar dan bidang studi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai sudut pandang ilmuwan yang berdedikasi pada pemberdayaan masyarakat guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang apa arti pemberdayaan.

Menurut Sulistiyan (2004, hal. 77) dalam (Masrudi dkk., 2021) secara etimologi, pemberdayaan berasal dari akar kata *daya* yang berarti daya atau kemampuan. Berdasarkan tafsiran ini, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses pemberdayaan diri sendiri atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada mereka yang belum memilikinya. Soetomo (2011, hal. 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Menurut Aziz, (2005, hal. 136) Praktik mendorong masyarakat, khususnya mereka yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya pembangunan, untuk menjadi lebih mandiri dalam membentuk kehidupan mereka sendiri dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Anggota masyarakat berkolaborasi dalam organisasi resmi dan informal untuk bertukar informasi dan pengalaman serta bekerja menuju tujuan bersama sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berulang. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan (2007, hal. 86) yang mencirikan pemberdayaan masyarakat sebagai cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi guna terbebas dari ketergantungan fisik dan emosional. Alasan pertama mengapa partisipasi masyarakat merupakan komponen mendasar dari inisiatif pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah karena hal tersebut merupakan cara yang efektif untuk mengatur dan melepaskan energi, pengetahuan, dan kreativitas masyarakat serta memobilisasi sumber daya

lokal. Kedua, upaya awal untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dibantu oleh partisipasi masyarakat.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004, hal. 80) adalah untuk menciptakan masyarakat dan individu yang otonom. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan seseorang. Diperlukan prosedur untuk mencapai kemandirian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan secara bertahap memperoleh keterampilan atau kewenangan melalui proses pembelajaran. Selain itu, pembangunan yang berfokus pada masyarakat, sering disebut sebagai pembangunan berbasis komunitas, erat kaitannya dengan konsep pemberdayaan. Untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, pemberdayaan sebagaimana dibahas dalam buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik karya Mardikanto dan Soebiato (2020) memerlukan proses pembelajaran yang mandiri. Lebih lanjut menurut Mardikanto dan Soebiato (2020, hlm. 111 - 112), berikut ini adalah beberapa inisiatif perbaikan yang ingin dipromosikan oleh pemberdayaan:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*). Melalui pemberdayaan, pendidikan bertujuan untuk ditingkatkan. Pemberdayaan memungkinkan peningkatan sumber daya, pendekatan, lingkungan, dan interaksi antara fasilitator dan penerima manfaat. Namun, yang lebih penting adalah bahwa pendidikan yang lebih baik dapat mendorong keinginan untuk belajar sepanjang hidup seseorang.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*). Peningkatan ini terkait dengan peningkatan pendidikan. Diharapkan bahwa etos pembelajaran seumur hidup akan meningkatkan aksesibilitas. Hal ini khususnya berlaku untuk sumber informasi dan inovasi, sumber pendanaan, pemasok peralatan dan produk, serta organisasi pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*). Tindakan yang lebih baik diharapkan dengan meningkatkan pendidikan dan meningkatkan akses ke berbagai sumber daya.

- 4) Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan meningkatkan kegiatan dan tindakan yang dilakukan, diharapkan bahwa kelembagaan akan menjadi lebih baik, dan ini termasuk membangun lebih banyak hubungan bisnis.
- 5) Perbaiki usaha (*better business*). Bisnis diharapkan lebih baik jika pendidikan (semangat belajar), aksesibilitas, tindakan, dan kelembagaan diperbaiki.
- 6) Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan perbaikan bisnis yang dilakukan, dia diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya, serta pendapatan keluarganya dan masyarakatnya.
- 7) Perbaiki lingkungan (*better environment*). Karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik maupun sosial.
- 8) Perbaiki kehidupan (*better living*). Kesejahteraan keluarga dan masyarakat diprediksi akan meningkat seiring dengan naiknya pendapatan dan perbaikan kondisi lingkungan. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup yang ditopang oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera.

Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh buku Ekonomi Lingkungan karya (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, hal. 42-44), pemberdayaan masyarakat memiliki empat tema utama sebagai tujuannya, yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tekanan ekonomi, mengembangkan potensi mereka, serta memanfaatkan potensi yang telah dimiliki masyarakat adalah tujuan utama pemberdayaan. Konsep dasar dari pemberdayaan ini terletak pada kesetaraan, yaitu menciptakan hubungan yang sejajar antara masyarakat dan organisasi yang menjalankan program- program pendukung kesetaraan tersebut.
- 2) Prinsip partisipasi, yaitu Komunitas perlu merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program pemberdayaan yang dapat mendukung peningkatan kemandirian mereka. Namun, untuk mencapai hal

tersebut, dibutuhkan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan mentor yang berdedikasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

- 3) Keswadayaan atau kemandirian, dimaksudkan yaitu Pendekatan ini menekankan pentingnya memprioritaskan kemampuan masyarakat daripada mengandalkan bantuan eksternal. Dalam konsep ini, kelompok miskin dianggap memiliki berbagai potensi, bukan sepenuhnya tanpa kemampuan. Mereka memahami lingkungan sekitar, memiliki semangat kerja keras dan keinginan untuk maju, serta menyadari hambatan yang dihadapi dan cara beradaptasi dengan norma sosial. Semua aspek ini perlu dipelajari dan dijadikan dasar dalam proses pemberdayaan. Untuk menjaga kemandirian mereka, bantuan material dari pihak lain sebaiknya dilihat sebagai bentuk dukungan, bukan ketergantungan.
- 4) Berkelanjutan, artinya program pemberdayaan perlu direncanakan agar berlangsung lama. Pada awalnya, posisi fasilitator mungkin lebih diutamakan daripada komunitas. Namun, ketika komunitas sudah mampu menjalankan kegiatannya sendiri, fungsi fasilitator akan berkurang hingga tidak diperlukan lagi.

Sementara itu, menurut Sumaryadi (2005) dalam (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, hal. 44) salah satu tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membantu kelompok kecil, terpinggirkan, miskin, dan terlantar untuk berkembang. Pemberdayaan ini bertujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, menjadi lebih mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemberdayaan juga berfokus pada penguatan sosial dan ekonomi mereka. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama bagi kelompok yang lemah dan tidak memiliki kedaulatan. Ketidakberdayaan mereka dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya keyakinan diri, maupun faktor eksternal, seperti ketidakadilan dalam sistem sosial. Soerjono Soekanto 1987 dalam (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, hal. 44). Tujuan dari pemberdayaan adalah membimbing individu dan komunitas agar mampu mandiri. Kemandirian ini meliputi kemampuan untuk berpikir secara mandiri, mengambil tindakan, serta bertanggung jawab atas keputusan dan

tindakan yang diambil. Selain dari hal tersebut, menurut Payne (2005) dalam (Amri & Ferizko, 2020, hal. 228) salah satu aspek pemberdayaan masyarakat adalah mengurangi pengaruh hambatan sosial dan pribadi yang menghalangi mereka untuk bertindak, dengan tujuan memberikan mereka kemampuan untuk membuat keputusan dan menentukan langkah yang harus diambil.

c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto dalam Sulandjari Kuswarini, dkk (2021, hal. 51) tahapan pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan adalah:

- 1) Tahapan persiapan, pada tahapan ini ada dua tahapan yang pertama adalah penyimpanan tenaga pemberdayaan masyarakat, yang dapat dilakukan oleh komunitas. Tahap kedua adalah persiapan lapangan, yang pada dasarnya dilakukan secara tidak langsung.
- 2) Tahapan pengkajian (*assessment*), pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok masyarakat pada tahap *assessment*. Dalam hal ini, petugas atau tim pengabdian menentukan kebutuhan yang dirasakan atau kebutuhan psikologis, serta sumber daya yang tersedia bagi masyarakat yang dituju.
- 3) Pada tahap perencanaan program atau kegiatan alternatif, penyelenggara berusaha melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Diharapkan masyarakat dapat mempertimbangkan berbagai inisiatif dan program alternatif dalam situasi ini.
- 4) Pada tahap pemformalisasi rencana aksi, Setiap kelompok menerima dukungan dari penyelenggara dalam merancang dan menentukan program serta kegiatan yang akan dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, penyelenggara juga membantu mengubah ide-ide mereka menjadi bentuk tulisan, terutama saat mengajukan proposal kepada sumber dana.
- 5) Tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat memastikan program pemberdayaan masyarakat bertahan. Karena hal-hal yang sudah direncanakan dengan baik kadang-kadang

melenceng saat di lapangan, kerja sama antar penyelenggara dan masyarakat sangat penting pada tahapan ini.

- 6) Tahap evaluasi, Penilaian sebagai proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan koordinator program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, partisipasi warga diharapkan dapat membentuk sistem pemantauan internal di komunitas; sementara itu, dalam jangka panjang, hal tersebut dapat memperkuat komunikasi antarwarga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 7) Pada tahap terminasi, proyek diharapkan segera berhenti karena pemutusan hubungan formal dengan komunitas sasaran.

Namun, pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu dan melibatkan proses pembelajaran yang berlanjut hingga kelompok tersebut menjadi mandiri. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004, hal. 83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- 1) Tahap pertama pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan kesadaran dan perilaku, di mana individu bertindak secara bijaksana dan penuh perhatian, serta merasa perlu untuk mengembangkan potensinya. Pada tahap ini, para pelaku, pihak yang memberdayakan, dan pelaku pemberdayaan bekerja untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Pemahaman tentang pengetahuan, keterampilan untuk memperluas wawasan, serta proses perubahan pengetahuan dan keterampilan membentuk tahap transformasi kemampuan. Perubahan pengetahuan dan keterampilan adalah langkah kedua, yang sering disebut sebagai proses transformasi kemampuan. Persiapan awal mendukung kelancaran prosedur dengan cara yang antusias dan efisien. Masyarakat tidak lagi dapat berperan sebagai subjek; mereka hanya dapat terlibat dalam posisi yang lebih rendah, seperti pengikut atau objek dalam pembangunan.
- 3) Masyarakat perlu terlebih dahulu meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan, dan kemampuan inovatif mereka sebelum dapat mengembangkan potensi untuk mandiri. Kemandirian akan tercermin dari

kemampuan masyarakat untuk mengelola, bekerja, dan berinovasi dalam lingkungan mereka. Setelah mencapai tahap ini, masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Saat ini, peran pemerintah lebih sebagai fasilitator, sementara masyarakat dianggap sebagai subjek utama dalam pembangunan.

Pemaparan Tim Delivery (2004) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2020, hal. 125–127) menyediakan tahapan-tahapan inisiatif pemberdayaan masyarakat, mulai dari kemandirian masyarakat hingga proses pemilihan lokasi/wilayah. Setiap langkah dijelaskan secara lengkap di bawah ini:

- 1) Penentuan lokasi/wilayah: Masyarakat, pihak terkait, dan lembaga sepakat mengenai kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan lokasi. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, pemilihan lokasi harus dilakukan dengan cara yang seefisien mungkin.
- 2) Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan secara sistematis untuk meningkatkan partisipasi kolektif. Sosialisasi berfungsi sebagai proses komunikasi yang mendorong dialog dalam masyarakat. Prakarsa dan kegiatan pemberdayaan yang diusulkan akan lebih dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai hasil dari proses ini. Minat atau kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi juga dipengaruhi oleh sosialisasi. Fasilitator program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat, menumbuhkan suasana yang inklusif, dan menyampaikan tujuan, taktik, alternatif, dan pokok bahasan terkait lainnya secara efektif.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soekanto dalam (Sulandjari Kuswarini, dkk 2021, hal. 51) untuk dianalisis pada tahapan pemberdayaan masyarakat.

d. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka, masyarakat secara kolektif melakukan hal-hal berikut sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji prospek, masalah, dan peluang area. Diharapkan masyarakat menjadi lebih mampu dan percaya diri untuk

menemukan dan mengevaluasi keadaan mereka, baik potensi maupun masalahnya. Pada titik ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang aspek kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Ini adalah bagian dari proses identifikasi: (a) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk pertemuan awal dan pelaksanaan teknisnya; (b) persiapan penyelenggaraan pertemuan; (c) melakukan penelitian dan penilaian keadaan; dan (d) membahas hasil dan membuat rencana tindak lanjut.

- 2) Tujuan dari temuan studi mengenai perencanaan kegiatan kelompok adalah pembentukan kelompok yang dapat bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Proses ini mencakup prioritas dan evaluasi masalah-masalah terkini, penentuan solusi terbaik, pencarian sumber daya untuk penyelesaian masalah, serta pembuatan dan koordinasi rencana kegiatan beserta pelaksanaannya. Sebagai hasilnya, rencana kegiatan kelompok harus mampu mengintegrasikan, memperbarui, dan memperkuat sumber daya masyarakat yang ada.
- 3) Mewujudkan rencana kegiatan kelompok yang telah disusun dengan bantuan fasilitator, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang nyata atau konkret dengan tetap mengacu pada rencana awal dan pelaksanaannya. Agar semua pihak terlibat, proses ini mencakup pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan, serta melakukan modifikasi jika diperlukan.
- 4) Pemantauan dan evaluasi partisipatif (PME) perlu diterapkan untuk secara terus-menerus memantau perkembangan dan hasil kegiatan. Agar proses tetap sesuai dengan tujuan, PME dilaksanakan secara komprehensif di setiap tahap pemberdayaan masyarakat. Sebagai persiapan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan, PME merupakan proses yang mencakup evaluasi, tinjauan, dan pelacakan terhadap tindakan yang diambil, termasuk implementasi serta hasil dan dampaknya.
- 5) Pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bentuk dukungan untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu menjalankan urusannya sendiri. Faktor internal dan eksternal memiliki dampak yang signifikan terhadap

proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk pengorganisasian diri bersama, unsur internal sangat penting dalam konteks ini, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal. Tim fasilitator yang beragam juga harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Salah satu komponen eksternal pemberdayaan masyarakat adalah tim pendamping ini. Pada awal proses pemberdayaan, tim fasilitator memainkan peran yang sangat aktif; namun, seiring berjalannya proses, posisi mereka akan semakin berkurang hingga masyarakat dapat melanjutkan kegiatannya sendiri. Kesepakatan bersama yang telah dibuat dengan masyarakat sejak dimulainya program akan menentukan kapan tim fasilitator akan pergi.

Menurut sudut pandang tersebut, pemberdayaan pada dasarnya terjadi dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Penyadaran masyarakat.** Sosialisasi merupakan sarana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mengomunikasikan rencana kegiatan program dan mendorong minat serta keinginan warga masyarakat untuk bergabung merupakan dua tujuan utama.
- 2) **Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan.** Namun, pada tingkat subjek, masyarakat masih terbatas pada peran sebagai pengikut atau objek pembangunan dengan tingkat keterlibatan yang rendah.
- 3) **Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka.** Pendampingan dalam proses pemberdayaan digunakan untuk memberikan alat yang diperlukan oleh masyarakat agar dapat mengelola urusan mereka secara mandiri. Kemandirian ini ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertanggung jawab, menciptakan sesuatu, dan membawa perubahan di lingkungan mereka.

e. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang dikenal dengan sebutan indeks pemberdayaan (Suharto, 2004) dalam (Suharto, 2017, hal. 63). Pemberdayaan dalam hal kemampuan ekonomi, akses terhadap manfaat sosial, serta kapasitas budaya dan politik merupakan

indikator yang baik untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Keempat dimensi kekuasaan-kekuasaan dalam, kekuasaan untuk, kekuasaan atas, dan kekuasaan dengan dikaitkan dengan ketiga elemen ini.

Sementara itu, (Mardikanto & Soebiato, 2020) Lembaga pendukung seharusnya berperan sebagai fasilitator, sementara keputusan mengenai proyek pemberdayaan masyarakat harus diambil oleh masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang tidak terbarukan. Lebih lanjut, menurut Mardikanto & Soebiato (2020), dari sudut pandang lingkungan, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan setiap orang pengetahuan, kemampuan, dan konsentrasi yang dibutuhkan untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mengetahui tanda-tanda utama yang menunjukkan apakah seseorang berdaya atau tidak sangat penting untuk memahami tujuan dan fokus operasional pemberdayaan. Untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan, hal ini akan membantu dalam memfokuskan inisiatif pemberdayaan sosial pada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, seperti keluarga berpenghasilan rendah.

2.1.2 Desa Wisata

a. Konsep Desa Wisata

Desa wisata merupakan pengembangan dari suatu desa yang memiliki potensi wisata dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan. Selain itu, alam dan lingkungan pedesaan yang masih asli dan terjaga menjadi salah satu faktor penting dari kawasan desa wisata. Melalui desa wisata, berbagai aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik bagi pengunjung, sehingga desa wisata tidak mengubah wajah desa, tetapi justru memperkuat kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa, baik kekhasan budaya maupun alamnya. Sementara itu, desa wisata menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Desa wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakikatnya tidak merubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalian potensi desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa (mewakili dan dioperasikan oleh penduduk desa) yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas

pariwisata, serta mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukungnya.

Selanjutnya, Ika Putra dalam (Dewi, 2013, hal.5) mendefinisikan bahwa desa wisata merupakan suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari kekhasan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dan sebagainya). Sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan yang harmonis yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya.

Sementara Inskeep (1991) dalam (Arida & Pujani, 2017, hal. 3) menuturkan bahwa desa wisata merupakan bagian dari bentuk implementasi pembangunan pariwisata yang didasarkan pada masyarakat yang berkelanjutan, dan sustainabel. Konsep desa wisata ini menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dimana para wisatawan yang berkunjung akan tinggal berdekatan dengan kehidupan tradisional di pedesaan, serta akan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Desa wisata, sebagai salah satu bentuk dari pariwisata pedesaan dapat memberikan banyak manfaat kepada upaya pengembangan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah pedesaan (Sugiarti, 2008) dalam (Arida & Pujani, 2017, hal. 3) . Berbagai potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan pengalaman autentik kepada wisatawan dan sekaligus memberikan Kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pariwisata.

b. Kriteria dan Indikator Desa Wisata

Salah satu jenis wisata pedesaan adalah desa wisata. Wisata pedesaan adalah perjalanan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, melestarikan dan memperoleh nilai dari lingkungan alam dan budaya serta adat istiadat setempat, serta menikmati suasana kehidupan pedesaan. Wisatawan tertarik pada kegiatan sehari-hari dan lingkungan sekitar masyarakat setempat. Alam (gunung, sawah, hutan, tebing, lanskap, flora dan fauna, serta taman laut) dan budaya (artefak bersejarah, adat istiadat, tradisi, kehidupan sehari-hari, dan

karya arsitektur) (juga dikenal sebagai *saujana*, atau karya budaya (objek) yang 'menyatu' dengan alam dapat dimasukkan dalam ruang lingkup desa wisata.

Menurut (Arida & Pujani, 2017, hal. 4) faktor alam dan bio-biologis, lingkungan fisik, budaya, fasilitas/prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan, sikap dan sistem kehidupan sosial, dan aksesibilitas telah disusun oleh para peneliti sebagai kriteria desa wisata.

Menurut Gumelar (2010) tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, antara lain:

- 1) Keunikan, keaslian, sifat khas
- 2) Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
- 3) Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
- 4) Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

2.1.3 Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Desa Wisata

a. Definisi Pendapatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pekerjaan (usaha, dan sebagainya) menghasilkan pendapatan. Kamus manajemen mengartikan pendapatan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh orang, badan usaha, dan organisasi lain dalam bentuk penghasilan, gaji, sewa, komisi, biaya, dan laba. Upah atau gaji yang diterima sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu disebut pendapatan dalam ilmu ekonomi; besarnya pendapatan yang diperoleh setiap masyarakat berfluktuasi berdasarkan pihak-pihak yang terlibat atau ketentuan dalam perjanjian yang berlaku. Dalam rumah tangga komersial, pendapatan diperoleh dari penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sebagai imbalan atas jasa produksi yang diperoleh dari keluarga konsumen dengan menggunakan tenaga kerja, tanah, dan sumber daya lainnya. Di

sisi lain, aliran uang pendapatan bergerak dari perusahaan ke masyarakat dalam bentuk upah, gaji, bunga, dan laba, sementara uang mengalir dari rumah konsumen ke rumah tangga perusahaan melalui pembelian barang dan jasa (Rosyidi, 2017, hal. 100).

Sementara, (Reksoprayinto, 2004 hal. 79) menuturkan bahwa pendapatan dapat dipahami sebagai jumlah uang yang diperoleh oleh individu atau negara dalam periode waktu tertentu, yang diukur dalam satuan mata uang. Pendapatan juga dapat dijelaskan sebagai total uang yang diterima oleh anggota masyarakat sebagai imbalan atau hasil kontribusi mereka terhadap produksi dalam kurun waktu tertentu.

Definisi pendapatan yang juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2003, hal. 109) pendapatan tersebut merujuk pada segala sumber keuangan tambahan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi atau untuk meningkatkan kekayaan, tanpa memandang nama atau struktur apapun. Dibawah ini termasuk didalam pendapatan menurut Mardiasmo yaitu:

- 1) Insentif atau pembayaran atas tenaga kerja atau jasa yang diberikan. Gaji, komisi, bonus, honorarium, pensiun, dan sebagainya semuanya termasuk dalam hal ini.
- 2) Imbalan, seperti uang tunai atau barang dagangan dari hasil kerja, hadiah, dan sebagainya.
- 3) Selisih antara penjualan barang dan biaya yang dikeluarkan dalam produksinya yaitu, biaya tenaga kerja, bahan baku, penjualan, dan sebagainya dikenal sebagai laba operasi.
- 4) Laba dari penjualan mengacu pada pendapatan awal yang dihasilkan oleh selisih antara penjualan barang dan biaya yang dikeluarkan dalam perolehannya, termasuk biaya tenaga kerja dan transportasi.
- 5) Pembayaran pajak yang dikembalikan setelah ditagih sebagai biaya. Kesalahan perhitungan dalam penghitungan pajak menjadi penyebabnya.
- 6) Bunga dari pelunasan utang kredit. Dalam hal ini, bunga mengacu pada pengembalian piutang yang melebihi jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak ketiga.

- 7) pembagian SHU (Saldo Operasional Bersih) dan dividen. Laba yang dibagi oleh perusahaan atau koperasi yang sama dengan modal yang diinvestasikan merupakan pendapatan dalam hal ini.
- 8) Pendapatan dari kompensasi yang diterima atas penggunaan hak cipta oleh orang lain dikenal sebagai royalti.
- 9) Pengalihan hak penggunaan kepada individu lain untuk jangka waktu tertentu dikenal sebagai sewa.

Menurut sudut pandang tersebut di atas, pendapatan dapat berasal dari penanaman modal, pemberian dari orang lain, atau sumber-sumber sebagaimana disebutkan di atas, di samping hasil perdagangan atau karyawan perusahaan.

b. Definisi Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga sebagaimana yang dikemukakan Rosyidi (2006, hal. 100) aliran uang dari dunia korporat ke keluarga dalam bentuk laba, bunga, sewa, dan upah serta gaji dikenal sebagai pendapatan keluarga. Sewa, upah dan gaji, bunga, dividen, laba perusahaan nonkorporat, dan pembayaran transfer merupakan pendapatan pribadi tersebut. Baik naik maupun turun, pendapatan masyarakat jelas terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Sementara itu, menurut Reksoprayinto (2004, hal 79) pendapatan keluarga adalah jumlah uang bulanan yang diperoleh seseorang atau kelompok keluarga dari gaji atau penghargaan perusahaan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, pendapatan usaha sampingan adalah uang tambahan yang diperoleh dari sumber selain kegiatan atau pekerjaan utama. Pendapatan utama dapat ditingkatkan atau didukung oleh uang tambahan yang diperoleh secara langsung.

Selanjutnya, Soekartawi (2002, hal. 132) juga mengatakan bahwa pendapatan akan berdampak pada kuantitas produk yang dikonsumsi dan sering diamati bahwa ketika pendapatan meningkat, kuantitas dan kualitas barang yang dikonsumsi meningkat. Misalnya, kualitas beras yang dikonsumsi lebih rendah sebelum pendapatan meningkat, tetapi membaik setelah pendapatan meningkat.

Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemajuannya juga rendah. Tujuan menyimpan kelebihan konsumsi di bank adalah untuk berjaga-jaga jika kemajuan dalam bidang manufaktur, pendidikan, dan bidang lainnya berdampak pada jumlah uang yang ditabung oleh masyarakat. Demikian pula, tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah hanya tinggi jika pendapatan keluarganya relatif tinggi. Kemampuan keluarga untuk mengelola pendapatannya merupakan faktor utama dalam menentukan seberapa banyak atau sedikit pengeluaran dalam masyarakat. Selain itu, pengalaman juga memengaruhi pendapatan; semakin banyak pengalaman bisnis yang dimiliki seseorang, semakin banyak peluang yang mereka miliki untuk meningkatkan pendapatan mereka. Keterampilan ekstra seseorang atau kelompok dalam memperluas kegiatan menyebabkan peningkatan pendapatan. Dengan memberantas kemiskinan dan mendukung organisasi masyarakat, berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Fauzia & Riyadi, 2014, hal. 135).

c. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Keluarga

Menurut (Boediono, 2002 hal. 150) ada beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan keluarga, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Beragamnya pilihan pekerjaan yang tersedia memberikan peluang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak.
- 2) Keterampilan dan wawasan yang mendalam dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan.
- 3) Inspirasi. Jumlah uang yang diperoleh juga dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan; semakin besar dorongan seseorang untuk menyelesaikan tugas, semakin banyak uang yang akan diperolehnya.
- 4) Kegigihan di tempat kerja. Kegigihan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan dan memiliki keberanian untuk menghadapi rintangan apa pun. Ketika seseorang menghadapi kegagalan, hal itu menjadi batu loncatan untuk mencapai kesuksesan.

d. Sumber - sumber Pendapatan Keluarga

Menurut (Boediono, 2002) penghasilan memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung, penghasilan dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Adapun sumber pendapatan rumah tangga yang disebutkan meliputi:

- 1) Dalam sektor formal, pendapatan biasanya berupa gaji atau penghasilan tetap dengan jumlah yang stabil. Sektor ini mencakup pekerjaan yang umumnya terdapat di perusahaan swasta atau lembaga pemerintah.
- 2) Pendapatan dari sumber tambahan seperti perdagangan, kerajinan, tenaga kerja, dan lain sebagainya merupakan sumber ketergantungan sektor informal.
- 3) Pendapatan di sektor subsisten diperoleh dari kerja keras seseorang dan termasuk hadiah dari orang lain, kiriman uang, hewan, dan hasil panen.

Sementara itu, Samuelson dan Nordhaus (2003, hal. 250) mengemukakan bahwa pendapatan juga bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari usaha pribadi adalah selisih antara total nilai produksi dan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai aktivitas seperti penjualan barang dagangan, toko online, perdagangan, layanan tenaga kerja, maupun jenis usaha lainnya.
- 2) Pendapatan dari usaha lain Ini adalah sumber pendapatan sampingan yang dihasilkan tanpa perlu tenaga kerja dan termasuk pendapatan dari pensiun, bunga investasi, sumbangan dari orang lain, dan penyewaan properti.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam memperkaya hasil penelitian, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan kajian dan sumber referensi yaitu sebagai berikut:

- 2.2.1 Penelitian dengan Judul Pengembangan Potensi Desa Wisata Saung Ciburial di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut oleh Sasti Lusiana Program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Universitas Siliwangi tahun 2023. Desa Sukalaksana yang memiliki berbagai potensi menjadi latar belakang penelitiannya. Desa Wisata Saung Ciburial mengembangkan potensi Desa Sukalaksana menjadi destinasi wisata. Potensi Desa Sukalaksana yang dimiliki diharapkan dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Saung Ciburial, serta menganalisis pelaksanaan inisiatif pengembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Saung Ciburial dikembangkan melalui empat jenis paket wisata, yaitu wisata outbound, wisata lukis dan kriya, wisata seni, serta wisata pertanian. Pengembangan desa ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti potensi alam, pendampingan program kreatif, kekhasan lokal, dan keberagaman budaya. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya promosi, minimnya sumber daya manusia, dan aksesibilitas yang tidak memadai.

- 2.2.2 Penelitian dengan judul Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal: Studi Desa Wisata Sukalaksana Kabupaten Garut, oleh Atu Setiati Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses ekonomi berbasis kearifan lokal melalui Desa wisata saung Ciburial, penelitian ini dilatarbelakangi dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di Desa Sukalaksana. Desa ini merupakan desa yang semula tertinggal dan masuk dalam desa miskin di Kabupaten Garut. Kemiskinan terjadi karena berdasarkan letak geografis desa Sukalaksana yang terpencil, petani tradisional, dan pola pikir masyarakat yang menginginkan serba instan, belum tergarapnya potensi desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui program desa wisata berbasis ekologi dan desa pendidikan, Desa Sukalaksana menjadi desa percontohan karena dapat meningkatkan perekonomian dengan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kearifan lokal dari produk khas, arsitektur pedesaan, dan budaya lokal yang dijadikan potensi desa dapat

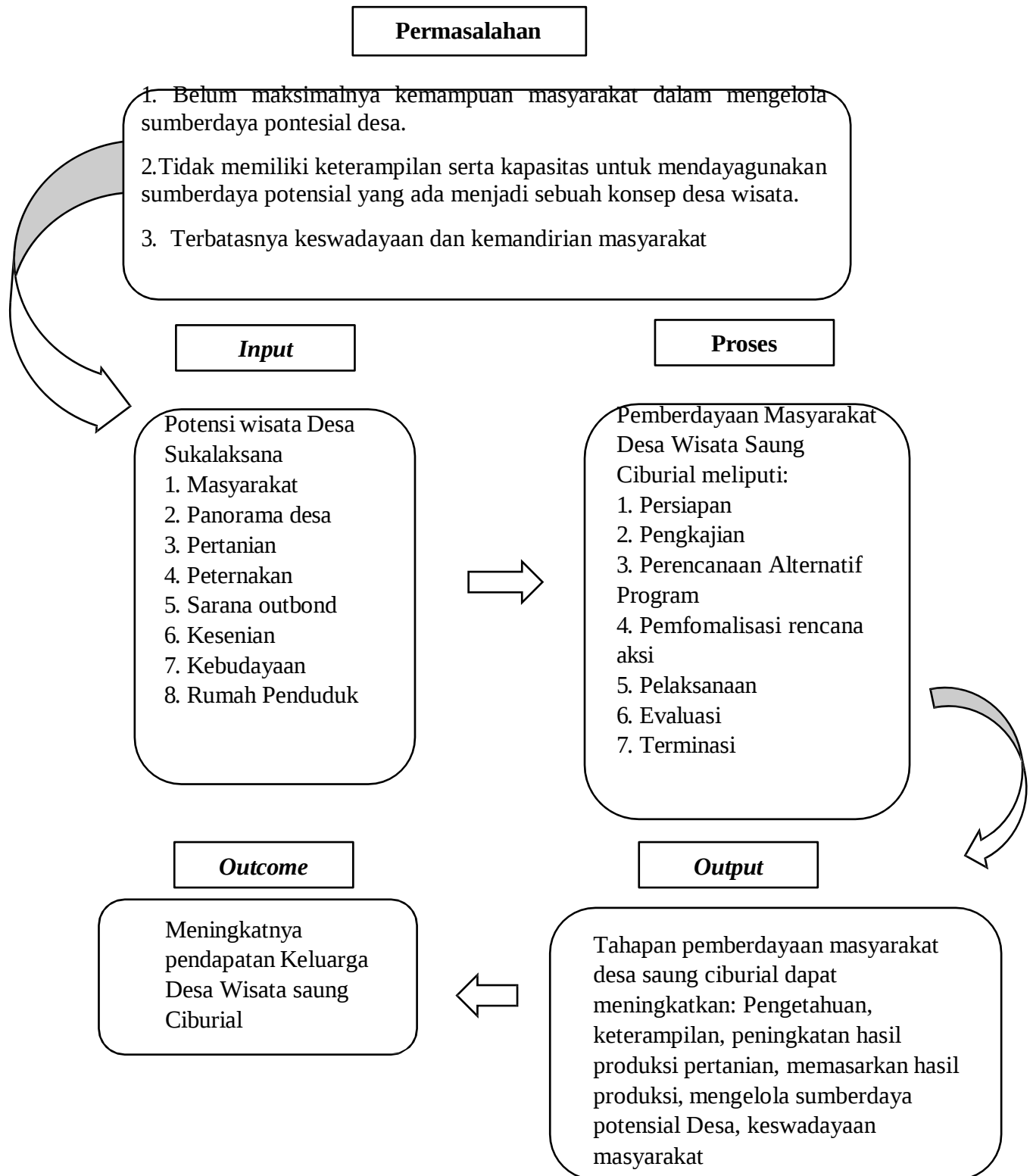
dikembangkan untuk mendukung ekonomi kreatif sehingga kemiskinan di desa dapat teratasi dengan baik sebagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan di desa.

- 2.2.3 Penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul oleh Nur Rika Puspitasari program sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012. Mencari referensi untuk kajian teori analisis data dan prosedur penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu cara penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini membantu penulis. Di sisi lain, temuan kajian Desa Wisata Sambu menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Sambu memberdayakan masyarakat dalam tiga tahap: penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kapasitas intelektual. Melalui pengelolaan Desa Wisata Sambu, pemberdayaan masyarakat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan keterampilan masyarakat.
- 2.2.4 Penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Koja Doi, yang diteliti oleh Marsudi, Nur Chotimah, dan Nurdin H. Abdul Rahman S, Program studi Pendidikan ekonomi, IKIP Muhammadiyah Maumere. Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa wisata dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual. 2) Banyak masyarakat lokal yang merasakan manfaat dari pembangunan Desa Wisata sebagai sarana pemberdayaan diri. Hal ini meliputi pelatihan penyuluhan kesadaran pariwisata, pengelolaan desa wisata, pelatihan SOP, pemanduan, kewirausahaan, dan katering, serta berbagai hal lainnya. 3) Berkembangnya Desa Wisata Koja Doi dan Desa Koja Doi berdampak pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat.

2.2.5 Penelitian dengan judul Pemberdayaan Obyek Wisata Goa Jati Jajar Melalui Partisipasi Masyarakat di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Oleh Erich Fitriawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012. Kontribusi penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini adalah untuk membantu penulis dalam mencari referensi untuk analisis data, kajian teoritis, dan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian di Desa Sambu adalah: 1) Pengelolaan Desa Wisata Sambu memberdayakan masyarakat melalui tiga tahapan yaitu penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual. 2) Meningkatnya kemandirian dan keterampilan masyarakat merupakan hasil pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan Desa Wisata Sambu. 3) Salah satu hal yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisata adalah tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pengelola.

2.2.6 Hasil Penelitian dengan Judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambu di Dusun Sambu, Pakembingun, Pakem, Sleman Yogyakarta, oleh Sabtimarlia Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di Dusun Sambu, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tiga hal yaitu: 1) proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui manajemen Desa Wisata Sambu; 2) hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui manajemen Desa Wisata Sambu; dan 3) faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui manajemen Desa Wisata Sambu.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses membangun, meningkatkan, dan memperbaiki masyarakat melalui inisiatif yang disesuaikan dengan sifat dan potensi unik masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Masyarakat diposisikan sebagai subjek yang menonjolkan peran serta aktif masing-masing masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat melalui metode pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat memberi masyarakat kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, menilai, dan mengatur sendiri kegiatannya, khususnya dalam hal pengelolaan desa wisata melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, memiliki angka kemiskinan tahunan yang relatif tinggi dengan potensi alam dan budaya yang belum tergarap. Desa Wisata Saung Ciburial didirikan dengan latar belakang minimnya keahlian masyarakat dalam mengelola desa wisata dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Sukalaksana, Desa Wisata Saung Ciburial dapat memanfaatkan panorama desa, pertanian, peternakan, amenitas luar desa, seni dan budaya serta rumah warganya sebagai produk wisata. Meningkatnya keterampilan dan kemandirian bagi masyarakat dan pengelola Desa Wisata Saung Ciburial merupakan hasil dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola desa. Agar masyarakat memperoleh penghasilan dari sisi ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan persoalan yang harus dijawab pada suatu penelitian dimana jawaban penelitian akan mampu membantu dalam menjawab dan memecahkan masalah dari penelitian. Maka diajukan pertanyaan penelitian “bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata Saung Ciburial dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut?”